

BAHASA DAERAH : ANTARA KERAPUHAN DAN KEPUNAHAN VERSUS PEMBERDAYAAN DAN PEMERTAHANAN

M.Okny.Fardian Gafari
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Krisis moneter memukul tajam perekonomian Indonesia dan membawa bangsa ini ke krisis multidimensi. Krisis multidimensi ini juga dialami oleh bahasa Indonesia, bahasa daerah dan budaya daerah/nusantara yang terdesak oleh arus modernisasi dan globalisasi (bahasa dan budaya asing). Krisis bahasa dan budaya ini tampak jelas dalam kehidupan masyarakat dan pola hidup para elite di Republik ini. Dalam perspektif sosio-politik linguistik, repertoar dan perubahan gejala kebahasaan masyarakat Indonesia, dari ekabahasaan yang berbahasa ibu bahasa daerah menjadi dwibahasawan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua dan bahasa Inggris/asing dan bahasa daerah sebagai bahasa kedua atau ketiga bagi sebagian masyarakat Indonesia merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan dipersoalkan secara terus-menerus. Seiring dengan penyebaran bahasa dan kebudayaan Indonesia yang semakin intens dan meluas, juga kehadiran bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, membuat sebagian bahasa daerah terabaikan atau terlantar. Salah satu komponen budaya bangsa itu kurang dihormati, kurang dihargai, dan kurang dipelihara oleh Negara dan para ahli warisnya. Pada hal dalam butir 2 pasal 32 UUD pasal 32 1945, hasil amandemen, dirumuskan bahwa "*Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional*". Dalam perspektif konstitusi dapat disimpulkan bahwa pengabaian dan pelanggaran atas UUD 1945 telah terjadi selama perjalanan republik ini. Negara dan masyarakat Indonesia yang mengaku pewaris nilai-nilai budaya bangsa telah menelantarkan warisan leluhur mereka.

Kata kunci : bahasa daerah , pemertahanan , dan pemberdayaan

PENDAHULUAN

Mungkinkah siaran berita di televisi pemerintah dan televisi swasta menggunakan bahasa daerah? Apakah bahasa Mandarin/Tionghowa saja yang boleh digunakan dalam penyiaran berita dan memiliki segi komersial/ daya jual dibanding bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia? Seandainya bahasa daerah lainnya juga memiliki media transmisi seperti bahasa Mandarin (suku minoritas) di Indonesia, mungkin masyarakat Indonesia di daerah pedesaan dapat tercerdaskan. Jumlah penutur bahasa-bahasa daerah lain jauh lebih banyak dibanding jumlah penutur bahasa Cina/Mandarin/Tionghowa di Indonesia. Mengapa masyarakat Indonesia etnik Cina/Tionghowa ini dapat melakukan itu? Mari kita telusuru jawaban dan deskripsi sosiokultural dan sosiopolitik-linguistik pada bagian berikut.

Krisis moneter memukul tajam perekonomian Indonesia dan membawa bangsa ini ke krisis multidimensi. Rakyat menderita, out put SDM pun anjlok. Masalah Negara Indonesia merupakan benang kusut, memutus benang dan merajut benang baru berarti mengizinkan terjadinya disintegrasi bangsa. Wacana yang demikian tidak mungkin dan tidak harus terjadi demi keutuhan NKRI, artinya, faktor politik dan nasionalisme harus dikedepankan, bukan kesejahteraan rakyat melalui pendidikan dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Krisis multidimensi di atas juga dialami oleh bahasa Indonesia, bahasa daerah dan budaya daerah/nusantara yang terdesak oleh arus modernisasi dan globalisasi (bahasa dan budaya asing). Krisis bahasa dan budaya ini tampak jelas dalam kehidupan masyarakat dan pola hidup para elite di Republik ini. Dalam perspektif sosio-politik linguistik, repertoar dan perubahan gejala kebahasaan masyarakat Indonesia, dari ekabahasawan yang berbahasa ibu bahasa daerah menjadi dwibahasawan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua dan bahasa Inggris/asing dan bahasa daerah sebagai bahasa kedua atau ketiga bagi sebagian masyarakat Indonesia merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan dipersoalkan secara terus-menerus. Gejala tersebut akan selalu merangsang untuk dikaji karena bagi bangsa Indonesia, semboyan *bhineka tunggal ika* tetap dipertahankan, keanekaragaman bahasa daerah, budaya daerah, dan bahasa asing dan budayanya tetap diberi ruang dan hak hidup berdampingan dengan bahasa nasional dan budaya nusantara.

Berdasarkan pengamatan di lapangan ketika berkunjung ke beberapa kota dan daerah di Indonesia, menunjukkan bahwa sebagian besar anak Indonesia yang berada di perkotaan, juga yang berasal dari keluarga dwisuku, dan berpendidikan relatif tinggi, sudah menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa ibu dan bahasa asing sebagai bahasa kedua. Di sisi lain, meskipun sebagian besar anak atau generasi muda di pedesaan memang masih berbahasa ibu bahasa daerah, gejala menurunnya mutu penguasaan dan penggunaan bahasa daerah, khususnya pada acara/kegiatan yang berhubungan dengan adapt istiadat, dan lainnya, rendahnya apresiasi generasi muda terhadap sastra dan budaya daerah, menjadi keprihatinan generasi tua. Jika ditanyakan mengapa demikian, jawabanya umumnya, kuno, tidak maju, kesannya tertinggal bila dibandingkan orang yang pandai berbahasa asing. Menurut hasil survei yang dilakukan UNESCO (Lauder, 2001: 124 -126), ketidaklancaran dan ketidakberhasilan transmisi (pewarisan) bahasa daerah antargenerasi penutur sangat memilukan, yakni, dari 90 bahasa minoritas yang disurvei di sejumlah Negara, hanya 36% terwaris secara mulus, 64 % tidak terwaris secara baik, 32 % berfungsi, 68 % bahasa minoritas tersebut tidak berfungsi sama sekali (punah). Deskripsi awal kehidupan bahasa –bahasa minoritas di sejumlah Negara itu, kendati perlu diteliti kembali, tidak terlalu berbeda jauh dengan kondisi terakhir bahasa-bahasa minoritas di Nusantara.

Perkembangan bahasa Indonesia yang bermula dari Melayu Riau sebagai *lingua franca* di pelbagai wilayah Nusantara, dan kemudian menjadi bahasa nasional dan bahasa Negara, bahkan semakin diminati oleh banyak bangsa, antara lain; Australia, Jepang, Korea, Jerman, dan Italia, diterima sebagai prestasi budaya bangsa Indonesia yang patut dibanggakan. Pada masa yang akan datang perkembangan bahasa Indonesia sebagai komponen kebudayaan Indonesia dan

sebagai jembatan antarbangsa akan semakin pesat pula. Walaupun demikian, mutu pemakaian bahasa Indonesia dengan wilayah penyebarannya yang belum merata, patut diprihatinkan. Masih banyak warga bangsa Indonesia yang rendah mutu penguasaan dan pemakaiannya, bahkan banyak yang buta bahasa Indonesia, dan ada pula wilayah di Tanah Air ini yang belum menjadi daerah pemakai bahasa nasional itu. Buta huruf dan buta bahasa, selain rendahnya gizi anak Indonesia selama krisis multidimensi yang berkepanjangan ini, menjadi indikator rendahnya mutu SDM Indonesia. Keadaan yang demikian ini jelas mempengaruhi usaha pemerataan pembangunan karena pemahaman konsep pembangunan umumnya berkaitan dengan pemahaman makna dan konsep IPTEK yang diungkapkan dalam bahasa Indonesia (Moelono, 1981: 2).

Nasionalisme yang dibangun oleh pendiri bangsa ini sejak awal abad ke 20, khususnya semangat *Soepah Pemoeda*, 28 Oktober 1928, diharapkan masih tertanam kuat dalam setiap sanubari warga bangsa. Nasionalisme kewilayahan nusantara yang utuh diteguhkan di bawah sumpah "Satoe Tanah Air", Tanah Air Indonesia", kesatuan jiwa dan semangat sebagai bangsa yang majemuk dilandasi sumpah "*Satoe Bangsa, Bangsa Indonesia*", dan roh budaya kebahasaan perekat kebersamaan didasari sumpah "*Mendjoendjung bahasa Persatuan, bahasa Indonesia*". Trisumpah itu kita sadari sebagai tiang penyangga utama wilayah tanah dan air yang luas, pengikat bangsa yang majemuk, keanekaan bahasa dan budaya sebagai penciri jati diri bangsa Indonesia.

Secara budaya memang harus diakui bahwa bahasa Indonesialah yang telah merekatkan masyarakat Indonesia yang multietnik ini menjadi satu bangsa. Dari sisi ini disadari bahwa bahasa Indonesia pula yang telah menunjukkan jati diri dan martabat bangsa kita sebagai bangsa yang mampu membangun kebudayaan Indonesia. Kenyataan bahwa melalui pendidikan nasional. Pengembangan IPTEK, termasuk seni, sastra, dan lainnya diwahanai oleh bahasa Indonesia itulah yang menunjukkan perkembangan bahasa Indonesia, kemajuan masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Rintisan Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 66, dan perjalanan bahasa Indonesia hingga kini, plus kehadiran sastra Indonesia. Politik Orde Baru yang sentralistik dan kebijakan penyeragaman dengan dalih demi persatuan dan kesatuan bangsa, memang cukup berhasil mengembangkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pembangunan dan bahasa modern.

Seiring dengan penyebaran bahasa dan kebudayaan Indonesia yang semakin intens dan meluas, juga kehadiran bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, membuat sebagian bahasa daerah terabaikan atau terlantar. Salah satu komponen budaya bangsa itu **kurang dihormati, kurang dihargai, dan kurang dipelihara** oleh Negara dan para ahli warisnya. Pada hal dalam butir 2 pasal 32 UUD pasal 32 1945, hasil amandemen, dirumuskan bahwa "*Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional*". Dalam perspektif konstitusi dapat disimpulkan bahwa pengabaian dan pelanggaran atas UUD 1945 telah terjadi selama perjalanan republik ini. Negara dan masyarakat Indonesia yang mengaku pewaris nilai-nilai budaya bangsa telah menelantarkan warisan leluhur mereka.

Era otonomi daerah dan era desentralisasi pengelolaan Negara, khususnya di bidang kebudayaan ini memerlukan kepedulian baru terhadap nasib warisan itu jika bahasa-bahasa daerah itu masih disepakati untuk tidak dibiarkan mengalami kerapuhan dan kepunahan. Ciri-ciri kerapuhan bahkan tanda-tanda kematian sejumlah bahasa local akan dicoba diperikan di bawah ini. Selanjutnya, ancaman pemberdayaan melalui pemekaran kembali fungsi sosiokulturalnya pada ranah adat – budaya dan ranah agama dianjurkan, di sisi ranah keluarga.

Sistem pendidikan sebagai instrument dan jalur formal penerusan bahasa daerah, masih memprihatinkan karena sebagaimana iklim pendidikan nasional kita yang masih terjebak formalisme. Rusyana (1999: 73-75) yang mengajukan fakta tentang nasib buruk bahasa-bahasa daerah besar, apalagi bahasa-bahasa kecil yang jumlahnya banyak tersebut, ternyata di 12 provinsi di Indonesia, hanya sejumlah kecil bahasa daerah yang diajarkan di SD dan SLTP. Diinformasikan bahwa hanya bahasa Aceh dan Gayo di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bahasa Batak (Toba, Angkola, Mandailing, Simalungun, Karo) dan bahasa Melayu di provinsi Sumatera Utara, bahasa Rejang di provinsi Bengkulu, bahasa Lampung di provinsi Lampung, bahasa Sunda di provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dialek Cirebon dan Indramayu di Jawa Barat, bahasa Jawa di provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan provinsi Jawa Timur, bahasa Madura di Jawa Timur, bahasa Dayak (Simpang dan Kanayan) di provinsi Kalimantan Barat, bahasa Banjar dan bahasa Kutei di provinsi Kalimantan Timur, bahasa Tombulu, Tonsawang, dan Mongondow di provinsi Sulawesi Utara, bahasa Bugis, Makasar, Mandar, dan Toraja di provinsi Sulawesi Selatan, bahasa Tolaki, Muna, dan Walio di provinsi Sulawesi Tenggara, serta bahasa Bali di provinsi Bali, diajarkan di sekolah-sekolah dasar dan menengah. Sementara, bahasa-bahasa daerah kecil lainnya di wilayah-wilayah di atas tidak diajarkan. Secara nasional, ternyata jauh lebih banyak wilayah provinsi yang tidak menjadikan bahasa daerah sebagai bahan pengajaran (muatan lokal) di sekolah-sekolah. Bahasa daerah hanya sebagai **titipan** dalam penerapan kurikulum muatan lokal sebagai pewarna saja. Terlepas dari seberapa jauh keberhasilan pengajaran bahasa daerah tersebut, tanda kecilnya penghargaan dan pemeliharaan atas unsur budaya bangsa di provinsi-provinsi tersebut masih tampak. Sementara itu, masih banyak sekali bahasa daerah kecil lainnya di luar 12 provinsi di atas yang memang belum dilirik, baik oleh para ahli warisnya, oleh lembaga pendidikan formal, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Sebelum melangkah cepat pada era global ini, penjejakan kembali masa lalu untuk menelusuri sejarah budaya merupakan sebuah kearifan yang tetap penting. Adalah fakta sejarah bahwa sebelum bahasa Indonesia mulai “menggeser” dan “menyusutkan” fungsi-fungsi bahasa daerah, semua bahasa daerah di Indonesia ini telah menjalankan fungsi kemasyarakatan dan fungsi transmisi nilai-nilai budaya antargenerasi (baca Halliday, 1977:8). Khazanah nilai budaya lokal dan perangkat norma sosial guyub tuturnya diwahanai dan diwariskan dalam kemasan bahasa daerah. Kendatipun berskala lokal dan berdimensi primordial, “prestasi” kebahasaan generasi-generasi terdahulu yang membangun identitas komunitas etnik itu, masih patut diacu (band. Ahmad, 2002: 439 – 441). Seiring dengan arus perubahan global yang semakin menderas, transformasi sosiokultural dan perubahan tatanan kebahasaan Nusantara ditengarai pula dengan dominasi bahasa

nasional dan bahasa asing, sementara di sisi lain bahasa daerah semakin terjepit. Bahasa Indonesia dengan fungsinya sebagai sarana komunikasi utama masyarakat kota, seperti juga budaya metropolitan dengan kedasyatan teknologi elektronik yang teknikal dan digital, telah membius generasi muda. Gejala konsumtif, materialistic, dan hedonistic yang mewarnai budaya masyarakat Indonesia, juga melanda ke generasi penerus yang semakin sepi dari tradisi, tercabut dan terputus dari akar masa lalu. Ini adalah kenyataan budaya bangsa di tengah era global, yang tampaknya semakin sulit disaring, dipilih, dipilah, dan diintegrasikan ke dalam wadah jati diri bangsa Indonesia.

GEJALA – GEJALA KERAPUHAN BAHASA DAERAH

Sebagian besar bahasa daerah di Indonesia tergolong bahasa kecil karena hanya didukung oleh kurang dari satu juta penutur, makin lama makin menyusut jumlah pendukungnya, dan umumnya tidak memiliki tradisi tulis (lihat, Ferguson, 1971: 324-326). Sebagian besar bahasa daerah tidak mengenal tradisi tulis sehingga pewarisan, proses pembakuan, pengembangan, dan upaya pemberdayaannya tersendat-sendat yang berakar juga dari persoalan bahasa-bahasa daerah. Kenyataan ini berbeda dengan bahasa Jawa, Sunda, Melayu, Batak, dan Bugis yang memang didukung oleh berjuta-juta penutur dan bertradisi tulis asli, aksara Arab, Jawi, dan Latin.

Penyusutan bahasa daerah adalah sebagai tanda kerapuhan suatu bahasa. Sejumlah bahasa daerah di Provinsi Papua, NTT, NTB, Maluku Tenggara misalnya, hanya didukung oleh beberapa ribu atau ratus penutur, bahkan di antaranya hanya didukung oleh beberapa penutur. Jumlah penutur muda pendukung bahasa-bahasa daerah itu semakin menyusut karena arus transimigrasi, urbanisasi, dan mobilitas sosial lintas etnik dan daerah yang semakin kuat gejalanya. Berdasarkan hasil penelitian Bagus dkk (1998), Gunarwan (2002), Mbete (2002) menyatakan bahwa ranah keluarga sebagai benteng terakhir, khususnya di kota dan desa-desa yang sudah tergolong maju, bahasa daerah tidak mendapat posisi dan fungsi penting lagi karena sudah diambil alih oleh bahasa Indonesia. Banyak ahli waris muda usia yang sudah malu, tidak percaya, dan tidak mampu menggunakan bahasa daerah. Jumlah ahli budaya dan bahasa daerah yang mencintai dan mengembangkan bahasa, sastra, dan budaya daerahnya semakin kecil.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, dan jika dikaitkan dengan tahapan ancaman kematian menurut (lihat, Fishman 1991: 88-109 & Reyhner, 1999) bahwa sejumlah bahasa daerah memang sudah berada pada taraf delapan, yakni taraf yang rapuh dan mencemaskan. Di antara bahasa-bahasa daerah di Indonesia memang ada yang hanya menyisakan segelintir penutur tua dan secara lingual tidak interaktif lagi antargenerasi. Banyak generasi muda berpendidikan tinggi dan tingkat mobilitasnya pun tinggi tidak mampu lagi berbicara dan berdialog dalam bahasa daerah dengan generasi tua dalam ranah adapt dan budaya lokal.

Kenyataan juga menunjukkan bahwa telah terjadi kesenjangan lingual dan cultural kedaerahan antargenerasi. Penguasaan dan penggunaan ragam halus, ragam baku, dan beku yang estetik dan kaya makna budaya pada sejumlah bahasa daerah